

---

## BAB I

### DASAR-DASAR PENGERTIAN MORAL

---

#### **A. Pengertian Moral**

Secara etimologis, kata *moral* berasal dari kata *mos* dalam bahasa Latin, bentuk jamaknya *mores*, yang artinya adalah tata-cara atau adat-istiadat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989: 592), moral diartikan sebagai akhlak, budi pekerti, atau susila. Secara terminologis, terdapat berbagai rumusan pengertian moral, yang dari segi *substantif materiilnya* tidak ada perbedaan, akan tetapi *bentuk formalnya* berbeda. Widjaja (1985: 154) menyatakan bahwa moral adalah ajaran baik dan buruk tentang perbuatan dan kelakuan (akhlak). Al-Ghazali (1994: 31) mengemukakan pengertian akhlak, sebagai padanan kata moral, sebagai perangai (watak, tabiat) yang menetap kuat dalam jiwa manusia dan merupakan sumber timbulnya perbuatan tertentu dari dirinya secara mudah dan ringan, tanpa perlu dipikirkan dan direncanakan sebelumnya. Sementara itu Wila Huky, sebagaimana dikutip oleh Bambang Daroeso (1986: 22) merumuskan pengertian moral secara lebih komprehensif rumusan formalnya sebagai berikut :

1. Moral sebagai perangkat ide-ide tentang tingkah laku hidup, dengan warna dasar tertentu yang dipegang oleh sekelompok manusia di dalam lingkungan tertentu.
2. Moral adalah ajaran tentang laku hidup yang baik berdasarkan pandangan hidup atau agama tertentu.
3. Moral sebagai tingkah laku hidup manusia, yang mendasarkan pada kesadaran, bahwa ia terikat oleh keharusan untuk mencapai yang baik , sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam lingkungannya.

Agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas perlu diberikan ulasan bahwa substansi materiil dari ketiga batasan tersebut tidak berbeda, yaitu tentang tingkah laku. Akan tetapi bentuk formal ketiga batasan tersebut berbeda. Batasan pertama dan kedua hampir sama, yaitu *seperangkat ide tentang tingkah laku* dan *ajaran tentang tingkah laku*. Sedangkan batasan ketiga adalah *tingkah laku* itu sendiri. Pada batasan pertama dan kedua, moral belum berwujud tingkah laku, tapi masih merupakan acuan dari tingkah laku. Pada batasan pertama, moral dapat dipahami sebagai nilai-nilai moral. Pada batasan kedua, moral dapat dipahami sebagai nilai-nilai moral atau norma-norma moral. Sedangkan pada batasan ketiga, moral dapat dipahami sebagai tingkah laku, perbuatan, atau sikap moral. Namun demikian semua batasan tersebut tidak salah, sebab dalam pembicaraan sehari-hari, moral sering dimaksudkan masih sebagai seperangkat ide, nilai, ajaran, prinsip, atau norma. Akan tetapi lebih kongkrit dari itu, moral juga sering dimaksudkan sudah berupa tingkah laku, perbuatan, sikap atau karakter yang didasarkan pada ajaran, nilai, prinsip, atau norma.

Kata *moral* juga sering disinonimkan dengan *etika*, yang berasal dari kata *ethos* dalam bahasa Yunani Kuno, yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berfikir. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1989: 237) etika diartikan sebagai (1) ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak), (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Sementara itu Bertens (1993: 6) mengartikan etika sejalan dengan arti dalam kamus tersebut. *Pertama*, etika diartikan sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Dengan kata lain, etika di sini diartikan sebagai *sistem nilai* yang dianut oleh sekelompok masyarakat dan sangat mempengaruhi tingkah lakunya. Sebagai contoh, Etika Hindu, Etika Protestan, Etika Masyarakat Badui dan sebagainya. *Kedua*, etika diartikan sebagai kumpulan asas atau nilai moral, atau biasa disebut *kode etik*. Sebagai contoh Etika Kedokteran, Kode Etik Jurnalistik,

Kode Etik Guru dan sebagainya. *Ketiga*, etika diartikan sebagai ilmu tentang tingkah laku yang baik dan buruk. Etika merupakan ilmu apabila asas-asas atau nilai-nilai etis yang berlaku begitu saja dalam masyarakat dijadikan bahan refleksi atau kajian secara sistematis dan metodis.

Sementara itu menurut Magnis Suseno, etika harus dibedakan dengan ajaran moral. Moral dipandang sebagai ajaran-ajaran, wejangan-wejangan, khotbah-khotbah, patokan-patokan, entah lisan atau tertulis, tentang bagaimana ia harus bertindak, tentang bagaimana harus hidup dan bertindak, agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber langsung ajaran moral adalah orang-orang dalam berbagai kedudukan, seperti orang tua dan guru, para pemuka masyarakat dan agama, dan tulisan-tulisan para bijak seperti kitab *Wulangreh* karangan Sri Sunan Paku Buwana IV. Sumber dasar ajaran-ajaran adalah tradisi dan adat istiadat, ajaran agama-agama atau ideologi-ideologi tertentu. Sedangkan etika bukan suatu sumber tambahan bagi ajaran moral, melainkan merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika adalah sebuah ilmu, bukan sebuah ajaran. Jadi etika adalah ajaran-ajaran moral tidakberada pada tingkat yang sama. Yang mengatakan, bagaimana kita harus hidup bukan etika, melainkan ajaran moral. (Magnis Suseno, 1987; 14).

Pendapat Magnis bahwa etika merupakan ilmu tidak berbeda dengan Bertens, sebagaimana terminologinya yang ketiga tersebut, di samping pada bagian lain juga menyatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan (Bertens, 1993: 4). Namun menurut Bertens, pengertian etika selain sebagai ilmu, juga mencakup moral, baik arti nilai-nilai moral, norma-norma moral, maupun kode etik. Adapun pendapat Magnis yang menyatakan etika sebagai filsafat juga sesuai dengan pandangan umum yang menempatkan etika sebagai salah satu dari enam cabang filsafat, yakni metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Bahkan, oleh filsuf besar Yunani, Aristoteles (384-322 s.M.), etika sudah digunakan dalam pengertian filsafat moral.

Etika sebagai ilmu biasa dibedakan menjadi tiga macam, yaitu etika deskriptif, etika normatif, dan meta etika. Etika deskriptif mempelajari tingkah laku moral dalam arti luas, seperti adat kebiasaan, pandangan tentang baik dan buruk, perbuatan yang diwajibkan, diperbolehkan, atau dilarang dalam suatu masyarakat, lingkungan budaya, atau periode sejarah. Sebagai contoh, pengenalan terhadap adat *kawin lari* di kalangan masyarakat Bali, yang disebut *mrangkat* atau *ngrorod* (Koetjaraningrat, 1980: 288). Di sini, etika deskriptif tugasnya sebatas menggambarkan atau memperkenalkan dan sama sekali tidak memberikan penilaian moral. Pada masa sekarang obyek kajian etika deskriptif lebih banyak dibicarakan oleh antropologi budaya, sejarah, atau sosiologi. Karena sifatnya yang empiris, maka etika deskriptif lebih tepat dimasukkan ke dalam bahasan ilmu pengetahuan dan bukan filsafat.

Etika normatif bertujuan merumuskan prinsip-prinsip etis yang dapat dipertanggung-jawabkan secara rasional dan dapat diterapkan dalam perbuatan nyata. Berbeda dengan etika deskriptif, etika normatif tidak bersifat netral, melainkan memberikan penilaian terhadap tingkah laku moral berdasar norma-norma tertentu. Etika normatif tidak sekedar mendeskripsikan atau menggambarkan, melainkan bersifat preskriptif atau memberi petunjuk mengenai baik atau tidak baik, boleh atau tidak boleh-nya suatu perbuatan. Untuk itu di dalamnya dikemukakan argumen-argumen atau diskusi-diskusi yang mendalam, dan etika normatif merupakan bagian penting dari etika.

Adapun meta etika tidak membahas persoalan moral dalam arti baik atau buruk-nya suatu tingkah laku, melainkan membahas *bahasa-bahasa* moral. Sebagai contoh, jika suatu perbuatan dianggap baik, maka pertanyaannya adalah : apakah arti “baik” dalam perbuatan itu, apa ukuran-ukuran atau syarat-syaratnya untuk disebut baik, dan sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dapat juga dikemukakan secara kritis dan mendalam tentang makna dan ukuran *adil, beradab, manusiawi, persatuan, kerakyatan, kebijaksanaan, keadilan, kesejahteraan dan sebagainya*. Meta

etika seolah-olah bergerak pada taraf yang lebih tinggi dari pada perilaku etis, dengan bergerak pada taraf bahasa etis (*meta* artinya melebihi atau melampaui).

## **B. Moralitas vs Legalitas**

Menurut Immanuel Kant, filsafat Yunani dibagi menjadi tiga bagian, yaitu fisika, etika, dan logika. Logika bersifat *apriori*, maksudnya tidak membutuhkan pengalaman empiris. Logika sibuk dengan pemahaman dan rasio itu sendiri, dengan hukum-hukum pemikiran universal. Fisika, di samping memiliki unsur *apriori* juga memiliki unsur empiris atau *aposteriori*, sebab sibuk dengan hukum-hukum alam yang berlaku bagi alam sebagai objek pengalaman. Demikian pula halnya dengan etika, di samping memiliki unsur *apriori*, juga memiliki unsur empiris, sebab sibuk dengan hukum-hukum tindakan manusia yang dapat diketahui dari pengalaman. Tindakan manusia dapat kita tangkap melalui indera kita, akan tetapi prinsip-prinsip yang mendasari tindakan itu tidak dapat kita tangkap dengan indera kita. Menurut Kant, filsafat moral atau etika yang murni justru yang bersifat *apriori itu*. Etika *apriori* ini disebut metafisika kesusilaan (Tjahjadi, 1991: 46-47).

Pemahaman tentang moralitas yang didistingsikan dengan legalitas ditemukan dalam filsafat moral Kant. Menurut pendapatnya, moralitas adalah kesesuaian sikap dan perbuatan dengan norma atau hukum batiniah, yakni apa yang oleh Kant dipandang sebagai “kewajiban”. Sedangkan legalitas adalah kesesuaian sikap dan tindakan dengan hukum atau norma lahiriah belaka. Kesesuaian ini ini belum bernilai moral, sebab tidak didasari dorongan batin. Moralitas akan tercapai jika dalam menaati hukum lahiriah bukan karena takut pada akibat hukum lahiriah itu, melainkan karena menyadari bahwa taat pada hukum itu merupakan kewajiban. Dengan demikian, nilai moral baru akan ditemukan di dalam moralitas. Dorongan batin itu tidak dapat ditangkap dengan indera, sehingga orang tidak mungkin akan menilai memberi penilaian moral secara mutlak. Kant dengan tegas mengatakan,

hanya Tuhan yang mengetahui bahwa dorongan batin seseorang bernilai moral (Tjahjadi 1991: 48).

Menurut Kant, moralitas masih dibedakan menjadi dua, yaitu *moralitas heteronom* dan *moralitas otonom*. Dalam moralitas heteronom, suatu kewajiban ditaati, tapi bukan karena kewajiban itu sendiri, melainkan karena sesuatu yang berasal dari luar kehendak orang itu sendiri, misalnya karena adanya imbalan tertentu atau karena takut pada ancaman orang lain. Sedangkan dalam moralitas otonom, kesadaran manusia akan kewajibannya yang harus ditaati sebagai sesuatu yang ia kehendaki, karena diyakini sebagai hal yang baik. Dalam hal ini, seseorang yang mematuhi hukum lahiriah adalah bukan karena takut pada sanksi, akan tetapi sebagai kewajiban sendiri, karena mengandung nilai kebaikan. Prinsip moral semacam ini disebutnya sebagai *otonomi moral*, yang merupakan prinsip tertinggi moralitas. Jika dihubungkan dengan teori perkembangan penalaran moral-nya Kohlberg, kesesuaian sikap dan tindakan semacam ini sudah memasuki tahapan perkembangan yang ke-6 atau tahapan tertinggi, yakni orientasi prinsip etika universal.

Pada bagian lain, Kant mengemukakan adanya dua macam prinsip yang mendasari tindakan manusia, yaitu *maksim (maxime)* dan *kaidah obyektif*. Maksim adalah prinsip yang berlaku secara subjektif, yang dasarnya adalah pandangan subjektif dan menjadikannya sebagai dasar bertindak. Meskipun memiliki budi, akan tetapi manusia sebagai subjek adalah makhluk yang tidak sempurna, yang juga memiliki nafsu, emosi, selera dan lain-lain. Oleh karena itu manusia memerlukan prinsip lain yang memberinya pedoman dan menjamin adanya “tertib hukum” di dalam dirinya sendiri, yaitu yang disebut *kaidah objektif* tadi. Kaidah ini tidak dicampuri pertimbangan untung atau rugi, menyenangkan atau menyusahkan.

Dalam kaidah objektif tersebut terkandung suatu perintah atau *imperatif* yang wajib dilaksanakan, yang disebut *imperatif kategoris*. Imperatif kategoris adalah perintah mutlak, berlaku umum, serta tidak berhubungan dengan suatu tujuan yang ingin dicapai atau tanpa syarat apapun. Imperatif kategoris ini memberikan perintah-

perintah yang harus dilaksanakan sebagai suatu *kewajiban*. Menurut Kant, kewajiban merupakan landasan yang paling utama dari tindakan moral. Suatu perbuatan akan mempunyai nilai moral apabila hanya dilakukan demi kewajiban itu sendiri. Di samping *imperatif kategoris*, juga dikenal apa yang disebutnya *imperatif hipotetis*, yaitu perintah bersyarat, yang dilakukan karena dipenuhinya syarat-syarat untuk mencapai tujuan tertentu sebagaimana yang telah dikemukakan.

Pandangan Kant tentang moralitas yang didasari kewajiban tersebut tampaknya tidak berbeda dengan moralitas Islam (akhlak), yang berkaitan dengan “niat”. Di sini berlaku suatu prinsip/ajaran bahwa nilai suatu perbuatan itu sangat tergantung pada niatnya. Jika niatnya baik, maka perbuatan itu bernilai kebaikan. Perbuatan yang dimaksudkan di sini sudah tentu perbuatan yang baik, bukan perbuatan yang buruk. Dengan demikain niat yang baik tidak berlaku untuk perbuatan yang jelek. Misalnya perbuatan mencuri yang didasari niat untuk memperoleh uang guna disumbangkan bagi orang-orang yang sangat memerlukan. Prinsip/ajaran tersebut lebih ditujukan pada suatu perbuatan yang tampaknya baik, akan tetapi didasari oleh niat yang tidak baik. Misalnya, seseorang yang membagikan sejumlah bantuan kepada orang-orang miskin, dengan niat agar memperoleh pujian dari masyarakat. Niat yang baik itu tidak lain adalah *ikhlas*, yakni perbuatan yang semata-mata ditujukan untuk memperoleh *keridhaan* (perkenan) Tuhan. Sementara itu dalam “etika” Jawa juga dikenal adanya ajaran *sepi ing pamrih*, yang maksudnya adalah niat yang bebas dari motif-motif kepentingan pribadi dalam melaksanakan sesuatu bagi kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

### **C. Sifat Moral : Perspektif Objektivistik vs Relativistik**

Dalam kajian tentang moral terdapat perbedaan pandangan yang menyangkut pertanyaan, apakah moral itu sifatnya objektivistik atau relativistik ? Pertanyaan yang hampir sama, apakah moral itu bersifat absolut atau relatif, universal atau

kontekstual, kultural, situasional, dan bahkan individual ? Menurut perspektif Objektivistik, *baik dan buruk* itu bersifat pasti atau tidak berubah. Suatu perilaku yang dianggap baik akan tetap baik, bukan kadang baik dan kadang tidak baik. Senada dengan pandangan Objektivistik adalah pandangan absolut yang menganggap bahwa *baik dan buruk* itu bersifat mutlak, sepenuhnya, dan tanpa syarat. Menurut pandangan ini perbuatan mencuri itu sepenuhnya tidak baik, sehingga orang tidak boleh mengatakan bahwa dalam keadaan terpaksa, mencuri itu bukan perbuatan yang jelek. Demikian pula halnya dengan pandangan yang universal, prinsip-prinsip moral itu berlaku di mana saja dan kapan saja. Prinsip-prinsip moral itu bebas dari batasan *ruang* dan *waktu*. Sebaliknya pandangan yang menyatakan bahwa persoalan moralitas itu sifatnya relatif, *baik dan buruknya* suatu perilaku itu sifatnya “tergantung”, dalam arti konteksnya, kulturalnya, situasinya, atau bahkan tergantung pada masing-masing individu. Dari dimensi *ruang*, apa yang dianggap baik bagi lingkungan masyarakat tertentu, belum tentu dianggap baik oleh masyarakat yang lain. Dari dimensi *waktu*, apa yang dianggap baik pada masa sekarang, belum tentu dianggap baik pada masa-masa yang lalu.

Salah satu kelemahan literatur tentang moral atau etika, terutama yang bersumber dari literatur Barat, adalah kurang adanya klasifikasi moral, etika pada umumnya tidak membedakan secara jelas antara kesusilaan dan kesopanan. Dua pandangan yang saling dipertentangkan itu sesungguhnya dapat diterima semua, dalam arti ada prinsip-prinsip etik atau moral yang bersifat Objektivistik-universal dan ada pula prinsip-prinsip etik atau moral yang bersifat relativistik-kontekstual. Prinsip-prinsip moral yang bersifat Objektivistik-universal yang dimaksudkan adalah prinsip-prinsip moral secara obyektif dapat diterima oleh siapapun, di manapun, dan kapanpun juga. Sebagai contoh adalah sifat atau sikap kejujuran, kemanusiaan, kemerdekaan, tanggung jawab, keihlasan, ketulusan, persaudaraan, keadilan dan lain-lain. Sedangkan prinsip-prinsip moral yang bersifat relativistik-kontekstual sifatnya “tergantung”, “sesuai dengan konteks”, misalnya tergantung pada konteks



kebudayaan atau kultur, sehingga bersifat kultural. Demikian seterusnya, sifat relativistik-kontekstual itu pengertiannya bisa berarti nasional, komunal, tradisional, situasional, kondisional, atau bahkan individual. Sebagai contoh adalah sikap kebangsaan, adab “ketimuran”, etika atau sopan santun orang Jawa atau Minangkabau, serta berbagai etika terapan.

Sebagaimana dikenal dalam kajian tentang macam-macam norma, dikenal adanya empat macam norma, yaitu norma keagamaan, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma kesusilaan itu lebih bersumber pada prinsip-prinsip etis dan moral yang bersifat Objektivistik-universal. Sedangkan norma kesopanan itu bersumber pada prinsip-prinsip etis dan moral yang bersifat relativistik-kontekstual. Sejalan dengan hal ini, Widjaja (1985: 154) mengemukakan bahwa persoalan moral dihubungkan dengan etik membicarakan tentang tata susila dan tata sopan santun. Tata susila mendorong untuk berbuat baik, karena hati kecilnya mengatakan baik, yang dalam hal ini bersumber dari hati nuraninya, lepas dari hubungan dan pengaruh orang lain. Tata sopan santun mendorong untuk berbuat baik, terutama bersifat lahiriah, tidak bersumber dari hati nurani, untuk sekedar menghargai orang lain dalam pergaulan. Dengan demikian tata sopan santun lebih terkait dengan konteks lingkungan sosial, budaya, adat istiadat dan sebagainya.

#### **D. Moralitas Objektivistik vs Relativistik : Perspektif Historis**

Timbulnya perbedaan pandangan tentang sifat moral sebagaimana dikemukakan itu tak terlepas dari sejarah perkembangan intelektual Barat yang dibagi dalam tiga periode, yaitu zaman Abad Klasik, Abad Pertengahan, dan Abad Modern. Sejarah ide dunia Barat dimulai sejak zaman Yunani Kuno sekitar abad ke-5 sM, dengan ahli pikirnya yang sangat terkenal, yaitu Sokrates, Plato dan Aristoteles. Ketiga pemikir terbesar abad klasik tersebut berpandangan bahwa prinsip-prinsip moral itu bersifat Objektivistik, naturalistik, dan rasional (Kurtines dan Gerwitz,

1992: 8). Maksudnya, meskipun bersifat obyektif sebagaimana yang telah dikemukakan, akan tetapi moral itu merupakan bagian dari kehidupan duniawi (natural) dan dapat dipahami melalui proses penalaran atau penggunaan akal budi (rasional). Sokrates yang meninggal pada tahun 399 sM, meskipun tidak meninggalkan karya tulis, ia mengajarkan tentang adanya kebenaran yang bersifat mutlak. Untuk mempunyai pengetahuan yang obyektif tentang kebenaran itu merupakan sesuatu yang sangat mungkin bagi manusia, melalui penalaran atau akal budi.

Plato (427-347 sM), pencipta istilah *ide*, mengatakan bahwa ide itu memiliki eksistensi yang nyata dan obyektif. Pendapat ini sekaligus untuk menyanggah kaum Sofisme yang mengatakan bahwa tidak mungkin terdapat suatu pengetahuan dan juga moral yang bersifat obyektif, sedangkan dunia itu sendiri terus-menerus berubah. Menurut Plato, pengetahuan maupun moral yang bersifat obyektif itu sangat mungkin, meskipun tidak di dunia fisik. Ia mengemukakan adanya dunia dunia, yaitu dunia fisik dan dunia ide. Dunia fisik itu terus berubah, sementara dunia ide atau dunia cita itu adalah dunia yang abadi. Lagi pula, dunia ide itu lebih tinggi dari pada dunia fisik, sebab dunia ide tidak rusak dan tidak berubah, tidak seperti halnya dunia fisik. Bagi *realisme Plato*, dunia ide itu merupakan realitas yang sesungguhnya dan lebih nyata dibanding dengan dunia inderawi. Untuk mencapai pengetahuan tentang kebenaran atau realitas yang lain tidak mungkin dicapai melalui pengalaman indera yang sifatnya terbatas. Hanya melalui akal budi atau penalaran, sebagai kekuatan khas yang hanya dimiliki manusia, seseorang akan mampu memahami dunia ide itu.

Sebagaimana halnya Plato, Aristoteles (384-322 sM) adalah seorang penganut realisme yang metafisik, namun terdapat perbedaan penting diantara keduanya. Menurut Aristoteles, materi lebih pokok dibanding dengan bentuk. Dalam bukunya yang berjudul *The Nicomachean Ethics* dikemukakan bahwa kebenaran merupakan tujuan yang ingin kita raih dan untuk meraihnya itu melalui kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Lagi pula, kebenaran itu sifatnya bertingkat-tingkat, dalam arti bahwa

ada jenis kebenaran yang lebih baik dari kebenaran-kebenaran lainnya. Hal ini sekaligus menimbulkan pertanyaan, apakah dengan demikian tidak berarti bahwa kebenaran itu sifatnya relatif ? Pertanyaan lain yang dikemukakan, adakah kebenaran yang ingin kita raih demi kebenaran yang lebih tinggi ? Sekiranya ada, maka kebenaran tertinggi itulah yang merupakan kebenaran mutlak. Untuk itu, manusia perlu mempunyai pengetahuan tentang kebenaran itu guna menjadi acuan dalam perilaku hidupnya. Menurut Aristoteles, kebenaran yang mutlak itu adalah *kebahagiaan dan berperilaku baik*. Kebahagiaan itu adalah sesuatu yang tuntas dan merupakan tujuan akhir. Kita mencapai sesuatu itu demi kebahagiaan, bukan mencapai kebahagiaan demi sesuatu yang lain. Konsepsi Aristoteles tentang moralitas tersebut lebih duniawi, lebih empiris, atau lebih aktual dibanding konsepsi Plato. Menurut Aristoteles, hidup secara baik merupakan aktualisasi fungsi-fungsi moral yang khas insani. Dalam dunia intelektual, moralitas itu tampil dalam proses pencarian kebenaran.

Abad Pertengahan berlangsung selama seribu tahun, sejak runtuhnya Romawi pada abad ke-5 hingga Renaisans di abad ke-15, sering disebut sebagai abad kepercayaan. Sepanjang zaman itu, sejarah pemikiran Barat dipengaruhi oleh kepercayaan yang kokoh akan kebenaran wahyu Kristiani. Dalam masa seribu tahun lamanya, persoalan-persoalan moralitas dan bahkan realitas alam ditempatkan dalam suatu kerangka pikir yang lebih didasarkan pada kepercayaan dibanding penalaran. Jawaban-jawaban atas persoalan moral yang lebih bersumber dari kepercayaan itu dipandang sebagai jawaban yang mutlak dan obyektif. Alam pikiran abad pertengahan dibangun atas dasar asimilasi antara kepercayaan dan penalaran, antara doktrin Kristiani dengan doktrin-doktrin rasional dan sekuler dari para filsuf abad klasik.

Agustinus (345-430), pemikir abad pertengahan yang karya-karyanya dipandang memiliki otoritas yang hampir sebanding dengan kitab suci, berpendapat bahwa pengetahuan tentang kebenaran yang mutlak dan obyektif dapat dicapai

melalui mistik tentang kebenaran Ilahi yang diterima secara langsung. Pandangan-pandangan Agustinus menjadi paradigma berfikir abad pertengahan hingga munculnya madzhab pikir Thomisme. Thomas Aquinas (1225-1274) adalah filsuf besar kedua di abad pertengahan, yang antara lain berpandangan bahwa manusia dan alam, moralitas dan keselamatan, iman dan penalaran, itu semua berada dalam kesatuan Ilahi (Kurtines dan Gerwitz, 1992: 19). Secara garis besar, konsepsi moral abad pertengahan berbeda dengan konsepsi abad klasik. Agustinus dan Thomas Aquinas mendasarkan pandangan moralnya yang bersifat spiritualistik dan terarah pada dunia kelak. Sedangkan pandangan moral Plato dan Aristoteles bersifat naturalistik, sekuler, rasional, dan terpusat pada dunia kini. Namun demikian antara abad klasik dan abad pertengahan terdapat persamaan, yaitu sama-sama berpandangan akan adanya standar moral yang obyektif. Dengan demikian perbedaannya terletak pada persoalan epistemologi, yakni sumber pengetahuan atau cara memperoleh pengetahuan tentang kebenaran obyektif tersebut.

Abad Pertengahan berakhir pada abad ke-15, yang disusul dengan bangkitnya ajaran, pandangan, dan budaya baru yang serba sekuler, yang dikenal sebagai zaman *Renaissance* (dari bahasa Prancis yang berarti “kelahiran kembali”). Dalam zaman ini, manusia seakan-akan dilahirkan kembali dari tidur yang panjang dan statis di abad pertengahan. Zaman Renaissance ini telah menandai jatuhnya otoritas Gereja dalam bidang spiritual dan intelektual yang telah berlangsung lima belas abad. Zaman Renaissance yang berlangsung pada abad ke-15 dan ke-16 telah menandai peralihan abad pertengahan ke abad modern. Dengan semangat sekuler dan corak yang sangat antroposentris, akal budi atau rasionalitas lebih diunggulkan dari pada iman. Selanjutnya pada abad ke-18, Eropa merupakan zaman “fajar-budi” atau zaman “pencerahan”, atau lazim disebut dalam bahasa Jerman sebagai zaman *Aufklärung*. Zaman fajar-budi sangat optimis dengan mengira bahwa berkat rasio, semua persoalan dapat dipecahkan. Hal ini tentu saja berimplikasi pada persoalan moral,

dimana moralitas modern kemudian lebih mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasional, sebagaimana yang akan dibicarakan kemudian.

Abad pencerahan merupakan suatu masa yang ditandai dengan berbagai kemajuan dan perubahan yang revolusioner. Abad ini mempersembahkan lahirnya ilmu pengetahuan modern, penemuan-penemuan baru di bidang sains yang mencapai puncaknya di tangan Isaac Newton (1642-1727) yang termasyhur dengan *hukum gravitasi*-nya. Dengan temuannya itu Newton seakan telah memecahkan rahasia alam semesta dan sekaligus telah meruntuhkan mitos dan pandangan dunia Barat yang dipercayai sepanjang abad pertengahan tentang alam semesta. Sedangkan sebelumnya, Galileo Galilei (1564-1642) telah dipaksa untuk mengingkari penemuannya yang telah menggugurkan mitos yang telah lama dipercayai bahwa bumi sebagai pusat alam semesta.

Sains modern memiliki karakteristik yang sangat mendasar, yaitu *pertama*, landasan metafisiknya bersifat naturalistik. Berbagai fenomena yang menjadi obyek penelitian dipandang sebagai produk dari berbagai proses kekuatan alam belaka, tidak terkait dengan hal-hal yang bersifat spiritual maupun supra natural. Pandangan naturalistik sains modern ini membedakannya dengan pemikiran-pemikiran abad pertengahan yang bersifat spiritualistik. Namun pandangan naturalistik ini juga merupakan ciri utama pemikiran abad klasik. *Kedua*, terkait dengan sifatnya yang naturalistik adalah sifat empiris. Teori-teori saintifik senantiasa bertopang pada pengalaman empiris yang didukung oleh data. Sebagaimana ciri yang pertama, ciri kedua ini membedakannya dengan pemikiran abad pertengahan yang mendasarkan pada kepercayaan (wahyu), namun ciri ini juga dimiliki oleh pemikiran abad klasik. *Ketiga*, sifat rasionalitas atau mengandalkan pada kekuatan akal budi, yang hal ini juga menjadi ciri pemikiran abad klasik. Akan tetapi, meskipun sama-sama bersifat rasional, terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara rasionalitas abad modern dan rasionalitas abad klasik.

Bagi alam pikiran abad klasik, akal budi atau rasionalitas merupakan kekuatan rohani manusia untuk mendapatkan pengetahuan tentang dunia. Kemampuan akal budi itu tidak terbatas pada pengalaman-pengalaman inderawi, melainkan juga mampu menangkap kebenaran universal. Kebenaran rasional merupakan kebenaran yang mutlak, obyektif, dan pasti. Hal itu berbeda dengan sains modern yang secara terang-terangan menolak kemungkinan diperolehnya kebenaran yang obyektif dan pasti. Lagi pula, kebenaran rasional ditempatkan di bawah kebenaran empiris. Kebenaran relatif dari sebuah hipotesis keilmuan yang didasarkan pada kerangka teoritik dan kerangka berpikir rasional dapat dan biasa digugurkan oleh temuan-temuan data empiris. Demikian pula setiap teori, hukum, atau dalil-dalil keilmuan senantiasa bersifat tentatif (sementara, dapat berubah) dan dapat dikoreksi oleh temuan-temuan baru. Jadi kebenaran empiris yang ditempatkan di atas kebenaran rasional itupun merupakan kebenaran yang probabilistik dan relativistik. Dengan demikian sains modern memberikan peranan yang terbatas kepada akal budi dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang dunia. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa sains modern didasarkan pada paradigma yang bersifat naturalistik, rasional-empiris, dan relativistik.

Paradigma sains modern tersebut berimplikasi dan berpengaruh terhadap pemikiran moralitas, sehingga persoalan moral tidak jarang disikapi oleh pemikiran modern dengan pendekatan naturalistik, rasional empiris, dan relativistik. Dengan pendekatan naturalistik, persoalan moral dipandang sebagai persoalan duniawi, terkait dengan kebutuhan hidup kini dan lain sebagainya. Dengan pendekatan rasional empiris, persoalan moral disikapi dengan lebih mengedepankan pertimbangan rasional, untung-rugi, dengan menunjuk berbagai kenyataan empiris, realitas sosial dan lain sebagainya. Konsekuensi dari kedua pendekatan tersebut, maka persoalan moralpun menjadi bersifat relativistik. Baik dan buruk menjadi sangat tergantung pada berbagai faktor, seperti tergantung pada konteksnya, situasinya, latar belakangnya, pertimbangan yang digunakan, bahkan tidak mengherankan jika

tegantung pada masing-masing individu. Berdasar uraian tersebut, maka kelemahan yang paling nyata dari pemikiran moralitas modern adalah tidak adanya kepastian moral, tidak jelasnya standar moral, atau dapat juga berupa kaburnya nilai-nilai moral.